# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu Dinas Daerah di ligkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial. Yang sebelumnya adalah kantor sosial Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan visi terciptanya suasana dan kondisi Sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat yang adil dan damai, berdiri Sejak tahun 2000 sampai 2008. Namun pada awal tahun 2008 Kantor Sosial diganti menjadi Dinas Sosial Kota Bandung yang di bentuk pada bulan februari tahun 2008 sampai sekarang, perubahan dari Kantor Sosial menjadi Dinas Sosial Kota Bandung dikarenakan suatu alasan yang timbul dalam suatu permasalahan sosial atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). yang timbul saat itu adalah dimana suatu keadaan yang tidak mengenakan yang dirasakan seseorang, kelompok orang atau masyarakat sehingga memerlukan suatu pemecahan yang harus segera terselesaikan, sehingga pada kondisi ini Kantor yang awalnya hanya kantor sosial dirubah menjadi Dinas Sosial Kota Bandung. Oleh pemerintah daerah itu sendiri yang mempunyai Visi dan Misi meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Melalui Peningkatan rehabilitas sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat.

Dinas Sosial Kota Bandung melalui Rencana Strategis guna mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan yaitu dengan menyusun beberapa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung merupakan penjabaran Visi dan Misi dari Dinas Sosial Kota Bandung,.

program tersebut meliputi, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Jalanan, Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Kemajuan suatu Dinas ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah di putuskan sebagai suatu kebijakan yang harusnya di dukung dan di tunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan pendidikan yang baik dan bimbingan didikan lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan, sehingga perlu dipersiapkan secara optimal. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia anak perlu di didik agar kelak mampu bersaing di dunia internasional.

Keberadaan dan berkembangannya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan mereka juga berhak atas pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan dalam menjamin hak-hak tersebut maka Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang isi nya secara garis besar dapat dikelompokan menjadi balita terlantar, anak terlantar, abak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tidak kekerasan lanjut usia terlantar penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, Keluarga fakir miskin, keluarga beruma tak layak huni, keluarga bermasalah , korban bencana alam, korban bencana sosial, orang dengan HIV atau AIDS dan keluarga rentan.

Bentuk peran tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanganan kepada anak jalanan tercantum dalam Peraturan Daerah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan penanganan anak mulai pusat pengembangan pelayanan anak jalanan, panti sosial anak, rumah singgah, rumah perlindungan anak, rumah belajar, pusat kegiatan masyarakat melalui organisasi sosial, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Permasalahan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Bandung terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum efektifnya sasaran program penanganan anak jalanan oleh Dinas sosial Kota Bandung, belum meratanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung kepada Anak jalanan, dan masih banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui Program Penanganan Anak Jalanan. Sehingga masih maraknya anak anak jalanan di kota Bandung.

Menurut Data yang diperoleh peneliti, Dinas Sosial Kota Bandung sudah berusaha melaksanakan penangangan program anak jalanan namun permasalahan penanggulangan anak jalanan masih belum sepenuhnya efektif, seperti : Dinas Sosial yang mempunyai Program penanganan anak jalanan di kota Bandung dengan Upaya mendirikan Rumah Perlindungan Anak (RPA) masih belum efektif,dapat dilihat dari data anak jalanan yang semakin bertambah, namun selain itu bukan hanya pemerintah yang melakukan penanganan namun lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam peanganan anak jalanan.

Pemerintah hanya terfokus pada anak jalanan yang berada di panti sosial saja namun masih banyak anak -anak jalanan yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerintah dalam hal pencegahan. Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pencegahan anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga dan memperhatikan anak jalanan yang berkeliaran yang berada di luar panti sosial atau diluar RPA. Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah masyarakat yang peduli pada anak jalanan belum memberikan sosulusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan.

Peneliti menyarankan seharusnya Dinas Sosial menentukan program dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan agar hasil evaluasi bisa digunakan untuk program yang akan datang agar lebih baik lagi. timbulnya anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan. Namun kompleksnya permasalahan jumlah anak jalanan dimana yang terus meningkat meneyebabkan penanganannya belum optimal dan efektif.

Sampai saat ini Bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan masalah anak-anak. Fenomena yang perlu mendapat perhatian saaat ini adalah maraknya anak-anak jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal dan lain sebagainya. Permasalahan anak jalanan menjadi salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak jalanan yang semakin meningkat. Kondisi ini di dasari oleh kondisi sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, sehingga menyebabkan keterlantaran pada anak. Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka terpenuhi.

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Kota Bandung, anak- anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (mall, restoran, dan lainnya) baik sebagai pedagang, pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir liar, kuli atau buruh pasar, ojeg payung, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya ataupun orang lain, anak- anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang peneliti temukan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan Judul

**“Efektivitas Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandung “ (Studi Kasus : lokasi Anak Jalanan di Lampu Merah Pasteur kota Bandung)”.**

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dan pertimbangan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini memfokuskan efektivitas Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandung**.**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui Efektivitas Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas
2. Sosial Kota Bandung dan

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

kegunaan teoritis,penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khusunya.

1. Kegunaan Praktis

kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbang pemikiran pada Dinas Sosial Kota Bandung mengenai Efektivitas Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan khususnya Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.